

PERSEPSI PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN LAPANG (PPL) TENTANG REVITALISASI PERTANIAN PADA ASPEK PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN SRAGEN

Oleh :

Bekti Wahyu Utami, SP. MSi *, D. Padmaningrum, SP. MSi* Hanifah Ihsaniyati, SP *

ABSTRACT

To previous research entitling "Penataan Kelembagan Penyuluhan Pertanian Dalam Rangka Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sragen" the aimed of this research circumstansial congeniality about settlement of extension institute in Sragen Regency.

The research result showed in the effort revitality extension agriculture in Sragen Regency have formed the "house self" to field extension workers namely with "Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH)." In other side, so far perception of field extension workers and farmer toward effort revitality institute is positif. According to them, with the existance of this program, field extension workers more paid attention. Though some among farmer don't know the name of extension revitality institute but farmer assess the condition of farmers extension workers in now more motivated, active and proactive and progressively entangle the farmer partisipatively in decision making.

Key Words : *revitality, extension, institute*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berpijak pada penelitian sebelumnya tahun 2006 yang berjudul "Penataan Kelembagan Penyuluhan Pertanian Dalam Rangka Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sragen" maka kiranya perlu untuk melakukan penelitian lanjutan guna melihat bagaimana sebenarnya revitalisasi pertanian khususnya aspek penataan kelembagaan dipesepsi oleh petani maupun PPL selaku sasaran dari strategi revitalisasi petanian itu sendiri.

Revitalisasi berarti membangun kembali dengan cara melakukan pembenahan. Ini berarti, berbagai

kekurangan yang selama ini menyertai dalam pengelolaan dan pembangunan sektor pertanian bakal dibenahi, ditata kembali dan dioptimalkan. Hal ini akan terwujud jika didukung oleh semua *stakeholders* yang ada terutama pemerintah dari pusat sampai ke tingkat desa. Di samping itu, penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai ke tingkat Desa termasuk petani.

Memang gaung revitalisasi pertanian telah terdengar sampai masyarakat petani. Namun apakah benar bahwa semua petani dan PPL

* Dosen di Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian UNS

telah mendengar dan bahkan telah mengerti dan memahami tentang bagaimana sebenarnya Revitalisasi Pertanian tersebut atau dengan kata lain, apakah telah ada kesamaan persepsi antara pemerintah (pelaku sosialisasi) dengan petani dan PPL tentang revitalisasi pertanian.

Persepsi petani dan PPL tentang revitalisasi pertanian akan mempengaruhi perilaku mereka dalam rangka mendukung keberhasilan Revitalisasi Pertanian. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji persepsi petani dan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) tentang Revitalisasi Pertanian.

Permasalahan

Pemerintah telah banyak melakukan sosialisasi tentang program Revitalisasi Pertanian. Petani dan PPL merupakan pelaku utama usahatani di tingkat paling bawah. Petani adalah pelaku utama pembangunan pertanian dan PPL adalah mitra kerja petani dan sekaligus kepanjangan tangan dari pemerintah termasuk ujung tombak sosialisasi program Revitalisasi Pertanian. Persepsi petani dan PPL akan menentukan kesiapan mereka dalam mendukung keberhasilan program ini. Untuk itu, penelitian ini akan mengangkat permasalahan tentang: Bagaimana persepsi petani dan PPL tentang Revitalisasi Pertanian khususnya pada aspek penataan kelembagaan ?

Tujuan penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah berupa pengertian mendalam tentang bagaimana persepsi petani dan PPL tentang Revitalisasi Pertanian pada aspek penataan

kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Sragen.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Dasar

Metode dasar penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan hanya untuk mendeskripsikan merupakan suatu situasi yang bersifat faktual secara sistematis sekaligus untuk memotret fenomena tertentutang sedang terjadi, dan penelitian ini dilakukan secara survei.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan di dua desa yakni desa yang terjauh dan desa yang terdekat dari Dinas Pertanian setempat dengan asumsi bahwa sosialisasi program Revitalisasi Pertanian ini sama untuk kedua tempat tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam dengan menggunakan interview guide untuk mengumpulkan berbagai informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan pada semua informan/nara sumber.
2. Mencatat Dokumen, teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen atau arsip yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, BPP, data monografi desa, Kelompok Tani dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Teknik Sampling

Dalam penelitian ini akan diambil beberapa informan yang dianggap tepat untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sragen

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sragen, dengan mengambil sample lokasi di Dua Kecamatan, yakni Kecamatan Karangmalang sebagai kecamatan yang dianggap paling dekat dengan Lembaga/Instansi pertanian dan Kecamatan Kali Jambe yang dinilai sebagai Kecamatan yang terjauh dari Lembaga Pertanian di Sragen. Dipilihnya dua kecamatan tersebut bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan revitalisasi pertanian yang telah dilakukan sejauh ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah Sragen dan bagaimana penyuluh maupun petani mempersepsi lembaga-lembaga penyuluhan pertanian di daerah mereka.

Untuk mengoptimalkan tugas memajukan otonomi desa, maka dilakukan pemberdayaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada. Terkait dengan hal ini berdasarkan amanat UU No 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka Kabupaten Sragen telah membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen. Dimana keberadaan dan berfungsinya lembaga ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BAPELUH berfungsi sebagai Koordinator pelaksanaan penyuluhan lintas dinas Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan dengan struktur kewenangan terdiri dari satu Kepala Badan yang disetarakan dengan Eselon II b, satu sekretaris dan tiga kepala urusan.

Berdasarkan bagan struktur organisasi BAPELUH, terlihat bahwa susunan organisasi BAPELUH terdiri dari:

1. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH); dimana dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Sekretariat BAPELUH; dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPELUH. Sekretariat BAPELUH terdiri dari Urusan Umum, Urusan Teknologi dan Kelembagaan serta Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sehingga dikatakan Sekretariat BPP ini mempunyai tugas membantu Kepala BAPELUH dalam pengelolaan Urusan Umum, Urusan Teknologi dan Kelembagaan serta Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Dimana masing-masing Bidang/Usuran tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah tanggung jawab Sekretaris BAPELUH.
3. Balai Penyuluhan Kecamatan; atau yang lebih dikenal selama ini

dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah merupakan lembaga pelaksana penyuluh di tingkat kecamatan.

4. Pos Penyuluhan merupakan kelembagaan di desa yang bersifat non structural. Berdasarkan bagan struktur organisasi yang ada maka seorang Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat BAPELUH dan Balai Penyuluhan Kecamatan. Sedangkan hubungan antara BAPELUH dengan Dinas-dinas terkait merupakan hubungan Koordinatif dimana teknologi dan informasi berasal dari dinas-dinas baik Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan maupun Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen yang kemudian pelaksanaan penyuluhannya dilakukan oleh penyuluh-penyuluh di BAPELUH.

Persepsi Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Tentang Revitalisasi Kelembagaan Pertanian Di Kabupaten Sragen

Penyuluh responden di Kecamatan Karangmalang memahami makna revitalisasi pertanian sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas sektor pertanian. Penyuluh cukup memahami gaung revitalisasi pertanian ini karena di Kabupaten Sragen revitalisasi pertanian secara lebih spesifik diimplementasikan antara lain dalam bentuk Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Menurut penyuluh, dengan program tersebut, diharapkan ada

peningkatan produktivitas pertanian, serta variasi komoditas unggulan, yang selama ini di Sragen masih didominasi komoditas padi.

Dari sisi kelembagaan, program revitalisasi diharapkan mampu meningkatkan dan menguatkan kelembagaan penyuluhan, karena dukungan beberapa aspek, khususnya fasilitas maupun penataan kelembagaan yang saat ini sedang di rintis. Namun di sisi lain dengan adanya revitalisasi ini menurut Koordinator penyuluh di Karangmalang, khusus bagi koordinator penyuluh, program satu desa satu penyuluh dianggap menambah beban kerja mereka karena selain memiliki tanggungjawab terhadap wilayah binaan di masing-masing desa, mereka juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan rutin untuk kegiatan administrasi ke BPP. Mereka juga harus melakukan koordinasi tugas dengan ketiga instansi terkait, yakni Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan, juga melakukan koordinasi dengan Camat setempat. Padahal, dari sisi fasilitas dan kesejahteraan hak mereka sama dengan hak penyuluh lain yang bukan koordinator penyuluh. Kegiatan koordinasi dilakukan rutin setiap seminggu sekali, yakni pada hari Jumat di Balai Desa serta hari Sabtu di Kecamatan.

Penyuluh di Karangmalang memaknai GAPOKTAN sebagai gabungan dari berbagai kelompok tani yang ada dalam satu desa. GAPOKTAN terdiri atas pengurus kelompok tani dan perwakilan anggota kelompok tani yang ada dalam satu wadah dengan pengurus yang berasal dari anggota GAPOKTAN yang dipilih secara musyawarah.

Adapun tugas dan fungsi dari GAPOKTAN adalah untuk mengkoordinasikan Kelompok tani yang ada dalam satu Desa serta wadah untuk bertukar pengalaman antar kelompok tani yang ada dalam satu Desa. GAPOKTAN menurut pendapat penyuluh sangat membantu dalam memberi pengarahan terhadap petani, melalui GAPOKTAN petani juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Penyuluh-penyuluh di Karangmalang menilai saat ini lebih banyak dukungan yang diberikan pemerintah pusat maupun PEMDA setempat terhadap penyuluh, seperti misalnya dukungan fasilitas seperti motor dinas kualitas pelatihan sesudah revitalisasi pertanian lebih berbobot. Selain itu dengan adanya revitalisasi pertanian ada peningkatan tuntutan terhadap profesi penyuluh, yakni penyuluh dituntut untuk bisa membuat areal percontohan/demplot. Sementara ini di Kabupaten Sragen dana untuk demplot diambil dari dana *recovery fund*.

Mengenai isi Undang-Undang sistem Penyuluhan Pertanian No 16 Tahun 2006, mereka setuju terhadap UU tersebut, meskipun belum mempelajari isinya secara detail. Secara global penyuluh mengetahui isi UU No. 16 tahun 2006 melalui sosialisasi melalui berbagai media, UU tersebut menurut penyuluh berisi tentang sebuah pembina an untuk pengaktifan sistem penyuluhan pertanian.

Sementara itu penilaian menurut PPL Kalijambe revitalisasi pertanian adalah penggabungan antara perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertanian. Kondisi sesudah dicanangkan revitalisasi pertanian keadaan pertanian lebih diperhatikan, keadaan lembaga dan penyuluh lebih baik dengan

perbaikan struktur dari lembaga penyuluhan. Kegiatan Sosialisasi pertanian yang di dapat penyuluh Kalijambe berupa seminar pembekalan dan pelatihan dari pemerintah daerah. Menurut mereka revitalisasi pertanian sangat bermanfaat bagi petani dalam mendapatkan informasi pertanian serta kemudahan serta kelancaran dalam melakukan kegiatan usaha tani.

Sebagian penyuluh responden mengaku belum mengetahui tentang Badan Penyuluhan tingkat pusat maupun Badan Koordinasi Penyuluhan di tingkat propinsi. Adapun mengenai Badan Pelaksana Penyuluhan tingkat Kabupaten (BAPELUH) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mereka cukup familiar. Menurut mereka, Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai fungsi koordinator penyuluh seluruh Kabupaten. Badan ini memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan penyuluhan di daerah, juga berfungsi sebagai sarana transfer informasi dari dinas-dinas terkait, yakni Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Keberadaan pos penyuluhan yang berada di tingkat desa ternyata juga sangat dikenal di Kecamatan Kali Jambe karena program satu desa satu penyuluh sedang di gencarkan oleh pemerintah daerah sragen. Mereka berpendapat bahwa pos penyuluh di tingkat desa sangat membantu karena dengan lingkup wilayah kerja yang lebih sempit membuat penyuluh dapat lebih memperhatikan petani.

Menurut PPL Kalijambe saat ini keberadaan penyuluh terutama penyuluh PNS sangat di dukung pemerintah dengan penyediaan pos penyuluhan di tingkat desa dan kendaraan sepeda motor dinas dengan

tunjangan BBM. Pelatihan bagi para penyuluh tetap diadakan sebulan sekali hanya saja kualitas pelatihan sekarang lebih baik dengan padatnya materi dalam pelatihan. Selama tahun terakhir PPL Kali Jambe menerima pelatihan mengenai pertanian organik dan pengaktifan lembaga penyuluhan termasuk pembentukan GAPOKTAN dan pengaktifan kegiatan-kegiatan kelompok tani. Di Kecamatan Kali Jambe juga terdapat beberapa penyuluh kontrak. Penyuluh kontrak pada dasarnya memiliki tugas yang sama dengan PPL PNS yang berbeda hanya status ikatan dinas dan fasilitas yang di terima, penyuluh kontrak menurut PPL Kalijambe sangat membantu dalam mengisi kekurangan tenaga penyuluh di Kalijambe. Dengan adanya penyuluh kontrak maka penyuluhan lebih divitalkan dan petani lebih terbantu dalam mengerjakan usahatani sehingga petani dapat meningkatkan produktifitasnya disamping itu penyuluh kontrak juga sangat membantu PPL PNS karena dengan penyuluh kontrak maka beban kerja PPL PNS lebih sedikit karena yang semula wilayah kerja mereka beberapa desa menjadi hanya satu desa, dengan demikian PPL dapat lebih dekat dengan petani dan lebih bisa memahami permasalahan petani sehingga teroptimalkan fungsi dari penyuluhan.

Persepsi Petani Tentang Revitalisasi Kelembagaan Pertanian Di Kabupaten Sragen

Petani responden di Kecamatan Karangmalang mengaku pernah mendengar tentang revitalisasi pertanian. Menurut keterangan dari petani yang juga pengurus dalam

Gapoktan petani mulai mengenal revitalisasi pertanian mulai bulan Desember 2006 melalui informasi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Pengertian revitalisasi pertanian menurut mereka adalah suatu perbaikan tatanan struktur pertanian terutama kelembagaan dari pertanian untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi terutama dalam hal penyuluhan, penyuluh dirasakan petani lebih aktif karena adanya perbaikan dari struktur lembaga penyuluhan yang sekarang telah berada di tingkat desa/kelurahan, serta penyuluh setiap hari terjun ke lapang untuk aktif melaksanakan tugas-tugasnya dengan demikian petani merasa kondisi setelah revitalisasi pertanian sangat terbantu dalam melakukan usaha tani dan mendapat kemudahan-kemudahan dalam memecahkan permasalahan yang sedang di hadapi petani melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Petani di Karangmalang mengenal Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan PPL baik PNS, swasta maupun swadaya/swakarsa. Tugas dan fungsi BPP menurut petani adalah memperlancar dalam proses koordinasi seluruh penyuluh dari berbagai desa. Sedangkan PPL PNS lebih dikenal dengan tugas dan fungsi sebagai penyuluh yang berstatus PNS, penyuluh swasta lebih dikenal sebagai distributor pupuk, pemasok benih dll yang memiliki informasi yang disampaikan petani namun, disamping itu juga memiliki kepentingan untuk memasarkan produknya kepada petani. PPL sadaya/swakarsa lebih dikenal sebagai masyarakat tani yang sukses dalam usaha tani dan memiliki kerelaan untuk memberikan penyuluhan pada petani.

Mereka hanya mengenal Pos penyuluhan yang berada di tingkat desa. Pos penyuluhan menurut petani Karangmalang bertugas dalam menyerap aspirasi petani untuk disampaikan pada pihak yang lebih berkompeten, memberikan solusi tentang masalah yang sedang dihadapi petani. Pos penyuluhan yang berada di Desa menurut petani Karangmalang sangat membantu karena dengan adanya pos penyuluhan di Tingkat Desa maka lebih terjangkau oleh petani sehingga permasalahan dan aspirasi petani segera tersalurkan sehingga cepat mendapatkan tanggapan dan solusi.

Di Kecamatan Kali Jambe ternyata tidak semua petani responden mengenal revitalisasi pertanian. Mereka yang hanya petani biasa tidak mengetahui tentang revitalisasi pertanian. petani yang kebetulan adalah perangkat desa mengaku tahu istilah revitalisasi pertanian, namun yang dipahami oleh seluruh petani di Kalijambe bahwa penyuluhan sekarang lebih aktif diadakan dan terjadi perbedaan dalam melakukan kegiatan usaha tani yaitu kemudahan dalam memperoleh informasi tentang pupuk, bibit dan telah menanam jenis dengan varietas yang berbeda untuk meningkatkan produktivitas. Menurut petani Kalijambe dengan lebih aktifnya penyuluh sangat membantu dalam memecahkan permasalahan yang sedang di hadapi petani.

Seperti petani-petani di wilayah lain, petani di Kalijambe juga telah tergabung dalam kelompok tani. Menurut mereka dengan melalui kelompok tani petani merasa dimudahkan dalam melakukan kegiatan usaha tani dan lebih terbantu dalam usaha peningkatan produktivitas. Kegiatan kelompok tani saat ini adalah

penyaluran pupuk, penyaluran bibit, pertemuan rutin, dan simpan pinjam. Petani kalijambe telah mengenal GAPOKTAN yaitu gabungan dari kelompok tani yang berada di dalam satu desa. GAPOKTAN dengan anggota pengurus kelompok tani dan pengurus yang diambil dari anggota GAPOKTAN, pengurus memiliki tugas mengkoordinasikan GAPOKTAN, dengan GAPOKTAN merupakan wadah untuk berkoordinasi dan tukar pengalaman serta informasi antar kelompok tani. GAPOKTAN juga mendapat dukungan dari semua lembaga, petani mengenal GAPOKTAN dari sosialisasi yang diadakan oleh PPL dengan GAPOKTAN koordinasi antar petani lebih teratur dan dapat bertukar informasi antar kelompok tani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyuluhan pertanian sekarang ini bersifat polivalen yang dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan maupun hortikultura.
2. Untuk wilayah Kabupaten Sragen telah dibentuk wadah struktural dalam Bentuk Badan Pelaksanaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten dan Kota sebagai wadah penyuluh pertanian, juga Pos Penyuluhan di tiap desa yang merupakan lokasi kerja tim Penyuluh.
3. Dengan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, diharapkan mampu menguatkan kelembagaan penyuluhan, sehingga akan dapat

meningkatkan motivasi dan kinerja penyuluh.

4. Dari sudut pandang petani, revitalisasi pertanian berarti meningkatkan peran, akses dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan kegiatan kelompok tani melalui GAPOKTAN.

Saran

1. Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH) merupakan langkah strategis dalam koordinasi kegiatan penyuluhan namun perlu diperjelas indikator keberhasilan program-program dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Kehutanan maupun dari BAPELUH.
2. Adanya Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap keberhasilan program dari Dinas Pertanian & Tanaman Pangan, Dinas Perikanan & Peternakan serta Dinas Kehutanan yang diserahkan kepada BAPELUH sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan, dimana sebagian program yang dilaksanakan BAPELUH tersebut adalah program dari ketiga dinas yang ada.

Anonim. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006*. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Bupati Sragen. 2007. *Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2007 : Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen*. Sragen.

LitBang Pertanian. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. www.litbang.deptan.go.id/specia/l/rppk-13k-Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Diakses tanggal 13 Agustus 2007 Jam 10. 30 WIB.

Singarimbun M. dan S. Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2004. *Kinerja Sektor Pertanian Tahun 2003-2004*. Departemen Pertanian. Jakarta.